

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 *Stakeholder Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta

3.1.1 Keterlibatan *Stakeholder* dalam Perspektif Partisipasi

Menurut pendekatan sosiologik dalam memandang masyarakat perkotaan, penduduk kota mencerminkan gaya hidup yang mengedepankan sifat individualistik. Talcott Parsons seorang pemikir sosiolog berkebangsaan Jerman mencoba mengidentifikasi tipe masyarakat kota yang kurang lebih sebagai berikut; *pertama*, masyarakat perkotaan cenderung lebih mementingkan rasionalitas, dalam hal ini tidak mau mencampuradukkan sesuatu yang bersifat emosional atau perasaan. *Kedua*, manusia masyarakat kota dengan segenap kekuatan dan kemampuannya berusaha untuk menyelesaikan permasalahan sendiri. Karena, antara satu rumah dengan yang lainnya berdampingan tidak memiliki hubungan kekeluargaan atau biasa jadi tidak saling mengenal. Setiap orang perkotaan tidak terbiasa menggantungkan diri pada orang lain. *Ketiga*, mutu dan keterampilan seperti prestasi akan mudah bagi seseorang untuk diterima dalam tatanan masyarakat perkotaan, *keempat*, heterogen, terdiri dari banyak komponen dan susunan ras, budaya maupun kebiasaan.

Dari empat tipe tatanan masyarakat perkotaan diatas tidak lantas mutlak berlaku seutuhnya. Mekanisme kehidupan Kampung Hijau Gambiran mengisaratkan ada temuan nilai-nilai yang mampu menggeser potret

'individualistik' masyarakat perkotaan. Tidak jarang dalam hubungan bermasyarakat kota timbul pertentangan antara kepentingan individu-individu dengan kelompok masyarakat untuk mentransformasikan lingkungan serta menimbulkan perubahan-perubahan. Kota Yogyakarta yang memiliki historis wilayah perkampungan dan peradaban tua yang tergerus oleh pusaran urbanisasi dan industrialisasi, dalam hal ini sebagian pendatang maupun warga perkotaan mengisi ruang-ruang formal diberbagai sektor pekerjaan. Artinya individu tidak banyak memiliki waktu untuk saling mengenal dan bersosialisasi dengan individu lainnya. Namun, dalam penelitian ini menemukan wilayah Kota Yogyakarta terbukti masih menjaga tatanan maupun nilai pertalian perasaan. Ada upaya unik untuk saling menjaga unsur-unsur ekologi, memelihara sistem kehidupan bermasyarakat dan kebudayaan asli yang kadang memberikan kesan bahwa nilai-nilai tersebut pantas digolongkan sebagai kebiasaan masyarakat desa. Seperti tolong menolong, paguyuban, kerja bakti, pengelompokkan program kerja, adat istiadat, kesenian, moral dan menjaga nilai alam ataupun lingkungan sekitar.

Gambar 3.1 Komunitas Kampung Hijau Gambiran Kota Yogyakarta



Sumber: Komunitas Kampung Hijau Gambiran, 2017.

Kampung Hijau Pandeyan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Hijau Gambiran merupakan salah satu dari sekian banyak kampung hijau yang ada di Kota Yogyakarta. Secara khusus Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kota Yogyakarta telah memfokuskan perhatian terhadap perkembangan komunitas ini. Pengembangan komunitas Kampung Hijau Gambiran bagi pemerintah dapat menjadi wahana mewujudkan kegiatan pemerintahan yang partisipatif melalui asas pemberdayaan. Membawa peluang agenda pembangunan pada persoalan empirik perkotaan. Dalam hal pendekatan pembangunan tuntutan partisipasi telah mengubah paradigma mengenai posisi masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran tidak lagi menempatkan diri sebagai objek, melainkan secara independen aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pertanggung jawaban program dan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup.

Sedangkan bagi Kampung Hijau Gambiran sebagai komunitas masyarakat sipil yang independen. Partisipasi institusi pemerintah akan membuat komunitas memiliki akses terhadap sumberdaya yang penting untuk mewujudkan nilai dan tujuan tertentu, yang mungkin akan tidak tercapai tanpa dukungan dari pemerintah. Hal ini menjelaskan mengapa komunitas Kampung Hijau Gambiran yang otonom mencerminkan upaya kegiatan yang cenderung kritis terhadap kebijakan pemerintah dalam hal pengelolaan lingkungan kota pada saat yang sama mereka memerlukan partisipasi pemerintah untuk menyelesaikan isu sosial perkotaan yang sedang mereka usung.

Pada kurun waktu tahun 2004 hingga tahun 2005 inisiasi tentang pengembangan kawasan Kampung Hijau Gambiran telah dicanangkan. Hingga pada akhirnya Desember 2004 hingga Februari 2005 (musim penghujan) di kampung ini terjadi banjir yang menyebabkan banyak kerugian terutama pada RT 31 sepanjang sungai seluas 500m² (hasil wawancara Rudi, 2017). Tidak hanya banjir pada tahun 2005 puncak permasalahan ditandai dengan terjangkitnya penyakit demam berdarah dari sebagian besar masyarakat. Sehingga usaha pembentukan komunitas Kampung Hijau Gambiran diawali dengan menghilangkan *culture gap* berupa kesenjangan budaya yang tidak peduli pada lingkungan. Sedangkan tercatat perlembagaan komunitas Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Gambiran baru terjadi pada tahun 2007 bersamaan dengan pengikraran deklarasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh ketua RT 45 RW 08 Gambiran Kelurahan Pandeyan Rudi Susanto, bahwa:

“Pada mula berdirinya Kampung Hijau ini tentu banyak sekali permasalahan, pro dan kontra masyarakat sangat kuat. Masalah lingkungan itu bukan suatu isu yang baik bagi semua orang. Apalagi banyak dari masyarakat kota mencari kehidupan secara praktis (gaya hidup yang praktis) seperti contoh membuang sampah sembarangan. Mereka membuang sampah ke tempat pemungutan sampah lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah. Semua butuh perjuangan setelah sekian tahun berjalan dengan baik. Kampung Hijau bisa dirasakan oleh masyarakat, menjadi kampung yang bersih terbebas dari bencana dan demam berdarah. Maka warga semakin hari semakin percaya ketika kita mengelola lingkungan dengan baik maka menimbulkan manfaat yang besar bagi kita”.

Pada awal berdiri, masyarakat didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Yogyakarta melakukan diskusi untuk memetakan permasalahan dan solusi serta langkah strategis. Dari situ mulai berangkat inisiatif masyarakat untuk membentuk Kampung Hijau. Arti penting deklarasi pada tanggal 1 April 2007

adalah sebuah impian panjang dari masyarakat yang menantang dan harus diperjuangkan bersama. Deklarasi tersebut dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat Yogyakarta, aktivis pemerhati lingkungan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), SaLing (sahabat Lingkungan), Badan Lingkungan Hidup DIY, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta. Seperti yang dijelaskan oleh Rudi Susanto (2017), bahwa:

“Kami senang dan bersyukur sekali karena ketika kami menyelenggarakan kegiatan lingkungan didukung sekali oleh pemerintah, bahkan waktu itu ada beberapa anggota dewan juga hadir. Maka itu menjadi semangat kita karena kita didukung oleh pemerintah Provinsi maupun Kota Yogyakarta”.

Dalam menjaga keberlangsungan kegiatan Kampung Hijau Gambiran tersebut komunitas tidak memberlakukan sanksi atau kesepakatan apapun ketika ada pelanggaran yang terjadi, misalnya ketika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Seperti yang dijelaskan oleh ketua RT 45 Pandeyan Rudi Susanto;

“Dalam menjaga prinsip kekeluargaan tetap mengedepankan pendekatan kepada masyarakat tanpa memberikan sanksi hukuman yang keras. Tidak ingin berkonflik sesama warga kita dan terus bersaudara. Yang bisa kita lakukan hanya sebatas pendekatan dan penyadaran melalui pertemuan-pertemuan di kampung dan pendekatan secara pribadi”.

Setelah adanya deklarasi masyarakat sepakat untuk mengorganisir komunitas menjadi lebih baik dan terukur. Maka pada tahun 2007 pelembagaan komunitas Kampung Hijau Gambiran dibentuk dengan susunan pengurus dan kelompok kerja sebagai berikut;

Koordinator	Drs. M. Jamroh Latief, M.Si.
CO Koordinator	Rysugiyantoro. SH.
Sekretaris	Agus Susanto. PN.
Bendahara	Ny. Etik Zuesdi
Fungsi TIM	Tim A Penayadaran dan Kampanye Kampung Hijau Tim B Diskusi dan Silaturahmi Tim C Program /Pokja.

Tabel 3.1. Anggota Penayadaran Kampanye, Diskusi dan Silaturahmi Kampung Hijau Gambiran

TIM A		TIM B	
1	Sukisno, SIP.	1	Drs. H.Fuad Zein.MA
2	Ngadiyono	2	Anton Rohadi
3	Sukardi	3	Drs. Suwendro, MM.
4	Sugito	4	Dra. Atisah Salid.
5	Suratman	5	Sukardjjo
		6	Surahman
		7	Tatik Yos tata bhumi. Ny

Tabel 3.2. Anggota Kelompok Kerja Sampah Bijak atau Sampah Mandiri

No	Kelompok Kerja C Sampah Bijak	
	RT 45	RT 30 dan 47
1	Suryati	Tri Priyatno. Ny
2	Mulyani Munir	Achmad Fulkani. Ny
3	Heni Herwindra	Sujarminah. Ny
4	Yuni Jumakir	Wantoro
5	Sarjiyem	Sukardi
6	Kristiani Herry Suhandu	-
7	Prabowo. Ny	-

Tabel 3.3. Anggota Kelompok Kerja Penghijauan dan Tamanisasi

No	Kelompok Kerja C Penghijauan dan Taman	
	RT 30	RT 31
1	Uliyah. Ny	Sudaryantoro
2	Budi Dopo. Ny	Ir. Dorajatun
3	Unsur Pemuda	Supriyo Utomo. Ny
4	-	Sukardjjo, Ny
No	Kelompok Kerja C Penghijauan dan Taman	
	RT 32	RT 45
1	Bagus Imam Syafeii. S.Kom.	Rudi Susanto
2	Amir Mirza. Ny.	Prabowo. PA.
3	Joko Supriyanto	Jumingan
4	Rysugiyantoro. Ny.	Hery Tri Fidianto. BcHk

Tabel 3.4. Anggota Kelompok Kerja Sanitasi / Ipal

No	Kelompok Kerja C Sanitasi / Ipal	
	RT 30 & 47	RT 45
1	Rusmanto	Drs. M. Jamroh Latief. M.Si.
2	Mudjijana	Agus Susanto, PN.
3	Sugiyatno	Drs. H.Fuad Zein, MA.
4	Yos Tata Bhumi Putranto,	Suhad
5	Gimin Susilo	Jumingan
6	-	Ketoen
7	-	-
No	RT 31	RT 32
	1	Sukisno.S.IP.
2	Rysugiyantoro.SH.	Ngadiyono.

Tabel 3.5. Anggota Kelompok Kerja Ekonomi Lingkungan

No	Kelompok Kerja C Ekonomi Lingkungan	
	RT 30	RT 31
1	Mudjijana. Ny	Sugito, Ny
2	Tatik Yos tata Bhumi. Ny	Prayitno. Ny
3	Sukardi. Ny	Sudaryantoro. Ny
4	-	Sopran. Ny
No	Kelompok Kerja C Ekonomi Lingkungan	
	RT 32	RT 45
1	Ani Suwendro. Ny	Yuni Jumakir. Ny
2	Tanti. Ny	Prabowo. PA.
3	Azista. Ny	Mulyani Munir. Ny
4	Siswoyo. Ny	Suryati. Ny

Tabel 3.6. Anggota Kelompok Pengelolaan Sungai dan Perpustakaan

No	Pokja Sungai Gajah Wong	Perpustakaan
1	Agus Susanto	Anjarini Pranesti.
2	Rudi Susanto	Bima Bagus Pamungkas.
3	Ketoen	-
4	Surahman	-
5	Sugito.	-

Sumber: Dokumentasi Kampung Hijau Gambiran, 2017.

Penetapan struktur institusionalisasi dan anggota kelompok kerja tersebut dilakukan secara musyawarah terbuka. Seluruh anggota pengurus komunitas Kampung Hijau Gambiran yang tercantum pada susunan pengurus diatas masih berasal dari masyarakat RT 30, 31, 32 45 dan 47 yang memang berada pada wilayah administratif RW 08 Gambiran Pandeyan. Pengukuhan kelompok kelompok swadaya masyarakat Kampung Hijau Gambiran sebagai organisasi resmi telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Yogyakarta, Kecamatan Umbulharjo, Kelurahan Pandeyan melalui surat keputusan Lurah Pandeyan No 6/KPTS/IV-2011 tertanggal 22 April 2011. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan, pelestarian masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dibidang lingkungan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengakui keberadaan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Gambiran guna menjadi wadah untuk koordinasi, perencanaan dan komunikasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Sementara itu, Walhi Yogyakarta selaku LSM lingkungan turut serta dalam mengawasi pengelolaan ketersediaan ruang terbuka hijau di beberapa wilayah Kota Yogyakarta tidak terkecuali ruang terbuka hijau Kampung Hijau Gambiran. Langkah tersebut telah mengacu pada fungsi dan peranan LSM Lingkungan dalam bidang non politik melalui pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, ekonomi,

sekaligus peranan dalam bidang politik. Fungsi Walhi Yogyakarta, yaitu sebagai wahana untuk menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah dan fungsi *subside*, yang mengacu pada fungsi-fungsi dari LSM Lingkungan (Akbar, 2016). Secara garis besar peran Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta pada awal mula berdirinya Kampung Hijau Gambiran adalah pendampingan dan advokasi (mitra utama). Hingga sampai saat ini kolaborasi antara komunitas tersebut tetap berlangsung. Secara khusus peran dan karakteristik kegiatan partisipasi Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3.7. Peran Walhi dan Sahabat Lingkungan Yogyakarta dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran.

Jaringan Advokasi	Keterangan
Pendukung	Dalam peran sebagai pendukung berisi kegiatan pengumpulan data, analisis pemetaan masalah lingkungan, dana, logistik, informasi dan juga akses kepada warga Kampung Hijau Gambiran.
Basis Kegiatan	Sebagai “dapur”, karena dalam menggalakan semangat pelestarian komunitas Kampung Hijau Gambiran dengan membangun basis masa, lalu pendidikan politik kader, membentuk lingkaran inti, mobilisasi aksi serta kampanye secara <i>softaction</i> .
Garis Depan	Garda depan dalam advokasi hukum yang diberikan kepada masyarakat Kampung Hijau Gambiran, kerja ini memiliki fungsi juru bicara, lobi dan negosiasi.

Sumber: diadaptasi dari Akbar, 2016.

Selain ada hubungan kolaborasi antara LSM lingkungan dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran ada pula hubungan partisipasi, kemitraan dan jejaring antara pemerintah dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Adapun institusi organisasi perangkat daerah pada tingkat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ikut menjalin kolaborasi dengan komunitas ini antara lain, Badan Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber

Daya Mineral. Sedangkan, pada tingkat Kota Yogyakarta yaitu, Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Dinas Sosial.

Hal tersebut disampaikan oleh Agus Susanto (2018) bahwasannya:

“Kami banyak berkerjasama dengan dinas DLH, PU, Kominfo, Bappeda, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, waktu itu masih jadi satu. Tapi yang paling dominan dari DLH dan PU. Dinas Sosial hanya temporer sekali saja waktu itu, mereka hadir memberikan bantuan saat bencana seperti sembako, tapi ya gak tiap tahun. Kalo yang provinsi BLH provinsi sama PU ESDM”.

Salah satu yang menonjol dalam kolaborasi partisipatif antara pemerintah dan Kampung Hijau Gambiran adalah hubungan fasilitator dan kontribusi berupa penyediaan akses dana dalam menjalankan program dan kegiatan kelompok kerja. Sedangkan, keterlibatan lembaga swasta dan komunitas Kampung Hijau hanya sebatas pengadaan sarana sanitasi oleh institusi jasa raharja dan pemberdayaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh *Unilever* (hasil wawancara Susanto, 2017), karena keterbatasan kemampuan masyarakat Kampung Hijau dalam hal pemanfaatan limbah sampah untuk diolah menjadi kerajinan tangan. Secara khusus peran dan karakteristik partisipasi pemerintah Kota Yogyakarta antara lain sebagai berikut;

Tabel 3.8. Peran Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran.

Pemerintah dan Masyarakat	Keterangan
Kontribusi	Pemerintah sebagai <i>Support sharing</i> menyalurkan dana untuk suatu program Kampung Hijau Gambiran.
Operasional	Pemerintah sebagai <i>Working sharing</i> ikut untuk berkejasama dan bertukar informasi dalam pertemuan dan diskusi praktis Kampung Hijau Gambiran.
Konsultatif	Pemerintah sebagai <i>Advisory</i> memberikan masukan kebijakan dan strategi, serta ikut merancang program evaluasi dan penyesuaian Kampung Hijau Gambiran.
Kolaboratif	Pemerintah sebagai <i>Decision making</i> adanya hubungan antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kerjasama dalam perumusan kebijakan, perencanaan, implementasi, evaluasi dan penyesuaian Kampung Hijau Gambiran.

Sumber: diadaptasi dari Mitchel, 2003.

Sebagaimana dinyatakan oleh Prasojo (2003:8) konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan biasanya selalu dikaitkan dengan konsep kemandirian, partisipasi, jaringan kerja dan keadilan. Pemberdayaan merupakan pemahaman secara psikologis pengaruh individu terhadap keadaan sosial serta dinilai sebagai strategi efektif untuk meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya masyarakat. Melalui pemberdayaan dapat menjangkau masyarakat terlemah melalui upaya membangkitkan semangat hidup untuk menolong diri sendiri. Untuk meningkatkan kemampuan dan peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran sebagai jaminan bagi pembangunan kemandirian yang berkelanjutan komunitas ini telah mengolah berbagai macam bentuk pemberdayaan. Beberapa kegiatan pemberdayaan di bawah

ini difasilitasi oleh insitusi pemerintah, LSM lingkungan dan atas inisiatif masyarakat, seperti;

Tabel 3.9. Kegiatan Pemberdayaan Kampung Hijau Gambiran

No	Kegiatan Pemberdayaan	Tempat
1	Pelatihan Lingkungan difasilitasi WALHI Yogyakarta	Bogor
2	Mediasi pengelolaan Lingkungan	Jakarta dan Bandung
3	Temu Pemerhati Lingkungan	Jakarta
4	<i>International Climate Change Conference</i>	Bali
5	Belajar pengolahan sampah tingkat lokal	Sukunan dan Gondolayu, Yogyakarta
6	Belajar pengolahan sampah mandiri	Surabaya
7	Aktif Pengurus Forum Perpustakaan	Kota Yogyakarta
8	Jejaring Pengelola sampah, Jari Polah	Kota Yogyakarta
9	Jejaring Pengelola sampah Propinsi, Merti Bumi Ltri	Yogyakarta

Sumber: Dokumentasi Kampung Hijau Gambiran, 2017.

Dari identifikasi hubungan diantara pemangku kepentingan diperoleh temuan belum adanya pertemuan secara berkala yang dilakukan oleh tiga aktor pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersama-sama dalam satu forum tertentu. Menurut Agus (2017) bahwa pertemuan untuk membahas keberlangsungan Kampung Hijau Gambiran dengan melibatkan pemerintah itu memang ada namun tidak “terprogram”. Jika dirasa perlu maka akan diadakan musyawarah dan diskusi dengan mengundang pihak pemerintah. Sedangkan menurut Rudi Susanto (2017) untuk pertemuan rutin masyarakat Kampung Hijau Gambiran yang pokok itu tetap ada seperti; pertemuan bapak-bapak pada setiap malam selasa kliwon, lalu ada kerja bakti yang dilaksanakan pada minggu pertama setiap bulan dan ronda pada setiap malam. Sedangkan, untuk ibu-ibu ada

dasawisma dan PKK yang diselenggarakan pada hari kamis, kegiatan keagamaan bapak-bapak pada hari Jum'at.

3.1.2 Keterlibatan *Stakeholder* dalam Perspektif Kemitraan (*partnership*)

Rasionalitas dari penggunaan kemitraan yang digagas oleh Selsky dan Parker (2005) setidaknya dapat menjelaskan fenomena kolaborasi di Kampung Hijau Gambiran. Keterbatasan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, korporasi dan kelompok masyarakat telah membuka mata para pelaku di ketiga aktor untuk meyakini perlunya melakukan aliansi dan kolaborasi agar mereka mencapai tujuan mereka masing-masing. Dwiyanto (2015:271) meyakini bahwa platform yang diusung Selsky dan Parker (2005) itu relevan, munculnya kemitraan antara ketiga belah pihak adalah kepedulian terhadap isu-isu sosial tertentu seperti, kemiskinan, kerusakan lingkungan dan konflik sosial. Sehingga, yang dirasa hal tersebut mengganggu kepentingan mereka bersama.

Untuk dapat menjelaskan keterlibatan *stakeholder* dalam perspektif kemitraan (*partnership*) pada pengelolaan Kampung Hijau Gambiran memerlukan alat ukur yakni adanya program kerja yang dilakukan komunitas dengan melibatkan unsur *governance* dan adanya agenda serta upaya kerjasama yang akan dilakukan oleh komunitas, institusi swasta dan institusi pemerintah secara bersama-sama dalam beberapa jangka waktu kedepan. Mengidentifikasi keterlibatan pemangku kepentingan dengan memperhatikan unsur pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam praktiknya untuk membangun kemitraan kepada pemerintah pihak komunitas Kampung Hijau menggunakan metode diskusi, mengundang langsung

pemilik otoritas kedinasan (pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Kota Yogyakarta) ke acara rutin Kampung Hijau Gambiran (*informal*). Sehingga cara tersebut dinilai lebih efektif dari pada melalui cara maupun prosedur yang resmi, surat-menyurat, dokumen proposal dan lainnya (*formal*).

Terkadang sistem birokrasi yang masih mengedepankan prinsip aturan menjadi kendala. Sulit bagi komunitas Kampung Hijau Gambiran untuk mengikuti berbagai peraturan hukum dan undang-undang pembangunan masyarakat yang cenderung kaku, yang hanya didasarkan prosedural pada Surat Keputusan (SK), Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), Petunjuk Teknis (Juknis) juga sistem penganggaran dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini menyebabkan sulitnya komunitas Kampung Hijau Gambiran berhadapan dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Akibatnya, beberapa tujuan pemberdayaan masyarakat sulit dicapai karena orientasi petugas lebih kepada mengikuti peraturan dari pada menjawab kebutuhan di lapangan.

Dalam hal ini, sebagian besar program dan kegiatan yang telah berjalan masih didominasi oleh keterlibatan pemerintah melalui dinas-dinas terkait sesuai dengan arah kegiatan maupun program. Komunitas tetap memandang bahwa pemerintah merupakan *stakeholder* yang memiliki tugas dalam hal pengadaan sarana dan prasarana guna mengembangkan kawasan tersebut. Dalam keterangannya Agus Susanto selaku pembina dan sekretaris Kampung Hijau Gambiran menjelaskan;

“Jika pemerintah bisa melakukan sasaran penghijauan sampai dikampung-kampung itu baru istimewa, warga menyiapkan lahannya, pemerintah memfasilitasi tanaman, warga merawat dan memeliharanya. Inilah harapan kami komunitas Kampung Hijau Gambiran RW 08

Kelurahan Pandeyan, Umbulharjo dan mungkin warga lainnya di Yogyakarta”.

Dalam beberapa kesempatan pihak swasta hanya terlibat dalam pengadaan beberapa infrastruktur sanitasi (MCK) dan pemetaan lahan kawasan Kampung Hijau Gambiran RW 08 Kelurahan Pandeyan. Berbagai keterbatasan kemampuan komunitas Kampung Hijau Gambiran memunculkan adanya fenomena pembangunan kemitraan yang unik. Pada tahun 2004 komunitas Kampung Hijau Gambiran telah menjalin komunikasi dan konsultasi dengan Walhi Yogyakarta kemitraan tersebut tidak lantas membuat komunitas Kampung Hijau Gambiran kehilangan independensi. Walaupun, keorganisasian maupun institusionalisme, kegiatan, teknis pelaksanaan dan program masih menerima masukan dan beberapa inovasi dari Walhi Yogyakarta. Keterlibatan *stakeholder collaborative governance* melalui indikator kemitraan yang dibangun oleh komunitas Kampung Hijau Gambiran dapat ditinjau dari kegiatan Kelompok Kerja (PokJA) sebagai berikut:

a. Kelompok Kerja Pengolaan Sungai

Dalam program kelompok kerja ini pemerintah berkontribusi dengan pengadaan dan pendampingan dalam pemenuhan bahan baku material pembuatan bronjong talud ramah lingkungan melalui dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada awal pembuatan konstruksi revitalisasi bantaran sungai Gajah Wong pada RT 30, 45 dan 47 mencapai 1.2 miliar (Agus, 2018). Pembangunan dimulai pada tahun 2003 dan selesai pada tahun 2015 sehingga tahap akhir nilai pembangunan talud bantaran sungai Gajah Wong menelan anggaran mencapai 3 miliar. Sebenarnya, program

talud dan bronjong itu belum sepenuhnya selesai karena setiap waktu terjadi pengikisan dan penyusutan bangunan serta infrastruktur. Pada tahun 2018 diprediksi komunitas Kampung Hijau Gambiran akan kembali mencanangkan pembangunan bronjong dan talud di beberapa titik bantaran sungai Gajah Wong.

Tabel 3.10. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sungai

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bahan baku (semen, batu, pasir dan jasa konstruksi) dalam pembangunan bronjong atau talud di bantaran sungai Gajah Wong pada RT 30, 45 dan 47 mencapai 3 miliar. 2. Memonitoring pembangunan dengan melibatkan tim yang dibentuk oleh warga. 3. Menyertakan staf ahli dari dinas terkait untuk memfasilitasi jalannya pembangunan dan penataan sempadan sungai.
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau Gambiran	Penyedia tenaga pembangunan yaitu 10 orang dari masyarakat terlibat aktif dalam pembangunan.
3	Swasta	Belum ada	Belum ada
4	Organisasi non Pemerintah lainnya	Walhi Yogyakarta	Pendampingan kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran dalam penataan kawasan bantaran sungai.

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

b. Kelompok Kerja Tamanisasi dan Penghijauan

Dari temuan dilapangan mengenai kelompok kerja tamanisasi dan penghijauan Kampung Hijau Gambiran terdapat fenomena kolaborasi yang kompleks. Kelompok Kerja Tamanisasi memiliki kegiatan pokok penghijauan di beberapa titik di kawasan RW 08 Gambiran. Ada peran dari beberapa institusi perguruan tinggi Yogyakarta seperti Universitas Teknologi Yogyakarta dan LSM lingkungan Walhi Yogyakarta dalam membantu pemetaan lahan tamanisasi dan penghijauan. Institusi pemerintah memberikan upaya stimulus bagi masyarakat dengan membagikan bibit tanaman serta pot yang diberikan kepada beberapa kepala keluarga pada November tahun 2012. Namun, tetap sebagian besar tanaman yang ada di perumahan masyarakat RW 08 Gambiran masih didominasi oleh hasil swadaya masyarakat.

Adapun tanaman di area ruang terbuka hijau *Gajah Wong Educational Park* yang ada di RT 45 merupakan hasil kemitraan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat. Karena untuk memperoleh bibit tanaman tertentu relatif mahal dan memerlukan banyak dana. Selain kegiatan tamanisasi dalam bentuk penghijauan, kelompok kerja ini menyelenggarakan penataan lingkungan kampung melalui pendekatan kompetisi mural bagi masyarakat dengan tujuan meminimalisir *vandalisme* dan menyertakan pesan pesan moral pada setiap gambar.

Tabel 3.11. Kolaborasi dalam Tamanisasi dan Penghijauan

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Kementrian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Pusat lalu di disposisikan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bibit tanaman mencapai 100 tanaman dan 20 pot kepada beberapa kepala keluarga RW 08 Gambiran. 2. Membangun beberapa infrastruktur di <i>Gajah Wong Educational Park</i> seperti papan petunjuk jalan, patung, paving jalan, tandon air, <i>gazebo</i> dan menara. 3. Memberikan pendampingan dan menjadi fasilitator dalam rangka pengelolaan infrastruktur <i>Gajah Wong Educational Park</i>
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	
		Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta	Memberikan bantuan cat dan kuas untuk kompetisi mural.
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau Gambiran	Penyedia secara swadaya bibit tanaman sayur dan buah buahan di masing-masing rumah warga dan Penyedia lahan dan pengelola tamanisasi.
3	Swasta	Perguruan Tinggi (Universitas Teknologi Yogyakarta)	Pemetaan lahan dan penataan kawasan lingkungan.
4	Organisasi non Pemerintah	Komunitas mural Yogyakarta	Pendampingan dalam penataan lingkungan melalui pendekatan mural.
		Walhi Yogyakarta	Pendampingan dalam penataan dan pemetaan lingkungan.

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

c. Kelompok Kerja Perpustakaan

Pada tahun 2005 perpustakaan ini telah berdiri dan beroperasi, menurut Agus (2018) perpustakaan Kampung Hijau Gambiran berdiri tidak serta merta karena ada program dan bantuan dari pemerintah. Awal pembentukan rumah baca perpustakaan Kampung Gambiran atas prakarsa masyarakat untuk meningkatkan minat membaca dan pengetahuan remaja dan anak-anak Kampung Gambiran. Setelah perpustakaan cukup lama beroperasi pemerintah dari Arpusda (Arsip dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta menyalurkan bantuan berupa buku. Teknis bantuan buku yang diberikan, pengurus menyampaikan kepada masyarakat buku apa yang diminati lalu hasil daftar buku tersebut diserahkan ke Arsip dan Perpustakaan Daerah Yogyakarta.

Perpustakaan “Jendela Dunia” Kampung Hijau Gambiran terletak di RT 45 RW 08 Gambiran Kelurahan Pandeyan awal berdiri perpustakaan itu bernama perpustakaan “45”. Bangunan ini memiliki 2 (dua) lantai, pada lantai pertama selain menjadi perpustakaan yang menyimpan buku juga sebagai balai pertemuan bagi masyarakat. Pada lantai 2 terdapat kamar yang berfungsi sebagai *Homestay* dilengkapi dengan toilet. Selain memiliki fasilitas buku perpustakaan jendela dunia dilengkapi dengan *freewifi* yang merupakan bantuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.12. Kolaborasi dalam Perpustakaan

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Membantu pembangunan fisik perpustakaan jendela dunia.
		Dinas Kominfo Kota Yogyakarta	Memberikan bantuan wifi yang setiap bulan menghabiskan dana mencapai 1.2 juta rupiah.
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Yogyakarta	Memberikan bantuan 200 buku dan membantu pembuatan dokumenter produksi audio visual untuk kampanye dan dokumentasi.
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau Gambiran	Terlibat aktif dalam mengelola dan membuka fasilitas perpustakaan untuk umum dan penyedia lahan dan pengelola perpustakaan.
3	Swasta	Jasa Raharja	Pembangunan infrastruktur toilet pada lantai 2 (dua) perpustakaan.

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

d. Kelompok Kerja Sanitasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal dimulai pada tahun 2010 pada RT 45 dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas pada RT 30 dan 47 pada tahun 2010 hingga selesai pada tahun 2012. Awalnya pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal berjumlah 12 tabung berguna sebagai pengganti *septic tank* bagi warga sebelum akhirnya masuk ke sungai Gajah Wong. Tidak semua masyarakat RW 08 Gambiran dapat memanfaatkan biogas dari Instalasi Pengelolaan Air Limbah seperti di RT 30 dan 47 memusatkan penggunaan biogas

pada dapur umum warga. Ada beberapa masyarakat RW 08 Gambiran menggunakannya untuk membuat berbagai olahan dalam memproduksi makanan.

Pada tahun 2009 pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah komunal Kampung Hijau Gambiran dibawah kuasa Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, bantuan dalam bentuk hibah langsung yang diberikan kepada masyarakat sebagai pendanaan pembangunan. Namun, berjalannya waktu fasilitator pemeliharaan dan perawatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kampung Hijau Gambiran menjadi tanggungjawab Dinas Pekerja Umum Kota Yogyakarta.

Tabel 3.13. Kolaborasi dalam Sanitasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Pengelolaan perangkat dan fasilitator.
		Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Memberikan bantuan pembangunan Ipal dengan nilai hibah mencapai 350 juta, fasilitator ketika pembanguann Ipal dan perawatan serta pemeliharaan perangkat.
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau	Penyedia tenaga pembanguna dan pengelola serta pemanfaatan biogas.
3	Swasta	Belum ada	Belum ada

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

e. Kelompok Kerja Energi Alternatif

Pada tahun 2004 atas inisiatif masyarakat komunitas Kampung Hijau membangun energi alternatif yaitu pemanfaatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah

menjadi biogas untuk keperluan rumah tangga dan membangun panel pembangkit listrik tenaga surya di 13 titik yang berada di Ruang Terbuka Hijau *Gajah Wong Educational Park* sebagai alat penerangan pada malam hari. Seiring berjalannya waktu pembangkit listrik tenaga surya tersebut rusak sehingga tergantikan oleh listrik biasa dikarenakan mahalnya perawatan sel solar dan tiap komponen.

Agus Susanto (2017) mengungkapkan bahwasannya:

“Seiring berjalannya waktu panel surya pembangkit listrik itu mati, karena komponen tersebut relatif mahal, bahkan masih impor. Jujur masyarakat tidak mampu untuk membeli komponen kerusakannya. Jadi kami berinisiatif untuk menggantinya menjadi lampu listrik PLN. Namun, kompon panel surya masih bisa diperbaiki”.

Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat Pusat lalu di disposisikan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, dalam proses perawatannya komunitas Kampung Hijau Gambiran menggandeng mahasiswa dari institusi perguruan tinggi Universitas Gajah Mada.

Tabel 3.14. Kolaborasi dalam Energi Alternatif

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pusat lalu di disposisikan ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Dan Energi Sumber Daya Mineral DI Yogyakarta	Pembangunan energi tenaga surya di 13 titik yang berada di Ruang Terbuka Hijau <i>Gajah Wong Educational Park</i> .
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta	Hibah pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah menjadi biogas di RT 30 dan 47.
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau	Masyarakat menyediakan lahan tepat di pinggir sungai Gajah Wong serta terlibat aktif dalam pembangunan dan perawatan pembangkit listrik tenaga surya dan Ipal biogas.
3	Swasta	Universitas Gajah Mada	Fasilitator dalam perawatan komponen.
4	Organisasi non Pemerintah lainnya	Walhi Yogyakarta	Fasilitator konsultatif

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

f. Kelompok Kerja Sampah Mandiri

Menurut Agus (2017) dalam mengelola bank sampah “Asri” kelompok kerja ini memiliki beberapa hambatan seperti terbatasnya penampungan sampah yang ada sehingga sampah yang telah terkumpul belum pada tahap pengolahan sudah dibawa oleh pemulung dan petugas sampah pemerintah kota Yogyakarta. Bank sampah “Asri” Kampung Hijau Gambiran masih sama seperti bank sampah pada umumnya, masyarakat dapat menyetorkan sampah seperti kardus, kertas dan

plastik bekas nantinya pengelola akan menyerahkan sampah yang telah terkumpul kepada pengepul mitra bank sampah Asri. Penyetor sampah akan mendapatkan uang sebagai gantinya atau uang tersebut akan ditabung di bank sampah. Sejauh ini penyetor sampah masih didominasi oleh warga Kampung Hijau Gambiran, namun pengelola bank sampah tetap akan menerima penyetor yang bukan berasal dari Kampung Gambiran.

Gerakan pengumpulan sampah dilakukan pada hari Sabtu, setelah itu sampah yang telah terkumpul akan diolah menjadi berbagai kerajinan tangan dan hiasan pernik-pernik. Dalam prosesnya Kampung Hijau menjalin mitra dengan berbagai pihak seperti, *Unilever*, Walhi Yogyakarta dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta. Dalam pembuatan kerajinan barang bekas masih didominasi sampah plastik. Rangkaian bunga-bunga dari sampah plastik yang telah terbentuk akan dikreasikan kembali menjadi bros, hiasan meja, dompet atau tas. Hasil kerajinan tangan tersebut nantinya akan dijual, ditampilkan pada pameran atau untuk keperluan pribadi.

Tabel 3.15. Kolaborasi dalam Sampah Mandiri

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta	Pengadaan satu unit tempat sampah dengan berbagai klaster tipe sampah. Pelatihan pengelolaan sampah menjadi kompos dan kerajinan tangan.
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau	Masyarakat mengadakan gerakan pengumpulan sampah pada hari Sabtu. Setelah sampah terkumpul diolah menjadi berbagai kerajinan tangan.
3	Swasta	Mahasiswa berbagai perguruan tinggi	Fasilitator konsultatif, pengabdian dan pendampingan pengolahan sampah.
		<i>Unilever</i>	Pembinaan pengolahan sampah.
4	Organisasi non Pemerintah lainnya	Walhi Yogyakarta	Fasilitator konsultatif, pembinaan dan pelatihan pengolahan sampah.
		Kopih Yogyakarta	Fasilitator konsultatif, pembinaan dan pelatihan pengolahan sampah.

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017

Ketua pengelola sampah Ny. Suryatin (2017) menerangkan bahwa partisipasi dan kemitraan yang ada di kelompok kerja Sampah Mandiri masih didominasi oleh instansi Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Sedangkan instansi swasta seperti *Unilever* pernah ada, dengan menggelar beberapa kali pendampingan, namun pelatihan tersebut mengharuskan masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat tertentu sebagai objek pelatihan. Sehingga banyak dari masyarakat yang tidak memiliki waktu, kendaraan dan antusias.

Ny. Suryatin (2017) Ketua Kelompok Kerja Sampah Mandiri mengungkapkan, bahwasannya:

“Pokja sampah mandiri, jelas dari pihak Badan lingkungan Hidup, Kelurahan Pandeyan juga pernah menjalin kerjasama. Dalam prinsip pelatihan dan pendampingan lebih kepada nilai saling berbagi pengetahuan, juga dari Walhi dan Kophi saling berbagi pengetahuan, bagian mana yang kurang dari pengelolaan maka akan mereka lengkapi. Saling tukar pengalaman intinya seperti itu. Untuk perguruan tinggi masih mendominasi pada kegiatan pendampingan dan ikut serta dalam pengolahan sampah”.

Tidak ada keuntungan yang ingin dicapai saat ini dari pengelolaan sampah mandiri, bank sampah yang dalam teknisnya lebih seperti konektor antara masyarakat dan pengepul. Namun, sejauh ini bank sampah Asri mampu meraup pendapatan Rp. 150.000 tiap bulan. Bahkan menurut Agus (2017) pendapatan kelompok kerja sampah mandiri jika dihitung dari awal berdiri telah mencapai puluhan juta. Jika ada pemotongan keuntungan maka itu hanya sebagai biaya operasional saja. Karena keuntungan tersebut akan diserahkan kepada masyarakat.

g. Kelompok Kerja Ekonomi Kreatif

Untuk membawa dampak pada perubahan ekonomi pada RW 08 Kampung Hijau Gambiran masyarakat berinisiatif membuat beberapa kerajinan tangan, makanan khas, pot bunga dan tanaman hias. Selain itu, dengan menjadikan Kampung Hijau Gambiran sebagai kampung wisata berbasis wisata lingkungan sebagai media pembelajaran penataan lingkungan. Hal ini kemudian membawa dampak bagi perekonomian warga ketika pengunjung datang masyarakat akan menjajakan barang dan olahan makanan yang telah dibuat. Namun, terkadang

ketika ada pagelaran acara festival dan perkumpulan rutin Kampung Hijau Gambiran yang mengundang tamu dan banyak pengunjung masyarakat belum mampu untuk menyediakan konsumsi secara penuh dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga.

Selain itu, kelompok kerja Ekonomi Kreatif memang selalu berkaitan pada kegiatan pengelolaan sampah. Sampah yang dikumpulkan dalam setiap bulan dapat menghasilkan barang yang dapat dijual. Namun, keterbatasan waktu dari hasil kerajinan sampah tidak mampu menjadi satu satunya sumber penghasilan warga yang dapat mencukupi keperluan rumah tangga.

Tabel 3.16. Kolaborasi dalam Ekonomi Kreatif

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Belum ada	Belum ada
2	Masyarakat	Komunitas Kampung Hijau	Masyarakat membentuk kelompok kelompok dalam menghasilkan berbagai barang kerajinan yang mapu dijual ketika festival mertu Gajah Wong dan acara rutin komunitas Kampung Hijau Gambiran
3	Swasta	Mahasiswa berbagai perguruan tinggi	Fasilitator konsultatif
4	Organisasi non Pemerintah lainnya	Walhi Yogyakarta	Fasilitator konsultatif

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

Mengacu pada temuan di lapangan maka hubungan kemitraan dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran sangat kompleks dan dinamis. Mengacu pada pemangku kepentingan tiga unsur *stakeholder*, yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta maka yang menjadi *stakeholder* primer pertama yaitu masyarakat yang

tergabung di dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran. Masyarakat RW 08 Gambiran menyelenggarakan urusan penyedia lahan, tenaga dan perawatan infrastruktur kawasan lingkungan Kampung Hijau Gambiran. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab terhadap segala fasilitas yang ada di Kampung Hijau seperti, Instalasi Pengelolaan Air Limbah Biogas dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah Komunal, infrastruktur mata air *Logathuk*, *Fitness Outdoor* dan Perpustakaan.

Selanjutnya, yang menjadi *stakeholder* primer kedua yaitu institusi pemerintah. Hal tersebut senada disampaikan oleh Agus Susanto:

“Kami memandang pemerintah sebagai mitra kerja, sejajar, kita tidak ada keterikatan, kita hanya sifatnya mitra temporer tidak mengikat dalam arti setiap tahun kita wajib dapat bantuan dari pemerintah. Jadi istilahnya tidak mengikat kita tidak ada ikatan apapun dengan mereka (pemerintah) begitu juga sebaliknya. Kami berbagi sumberdaya untuk melestarikan lingkungan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat”.

Hampir seluruh kelompok kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan Kampung Hijau Gambiran Pemerintah Provinsi Yogyakarta atau Kota Yogyakarta ikut andil sesuai tupoksi kedinasan. Aktif dalam pendanaan, pengelolaan perangkat serta infrastruktur, memfasilitasi dan pengembangan kawasan Kampung Hijau Gambiran (hasil wawancara Ir. Christina Endang). Hadirnya pemerintah sebagai *stakeholder* primer kedua dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran lebih dikarenakan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat organisasi Kampung Hijau Gambiran. Namun inisiatif kemitraan tidak lantas berasal dari kehendak pemerintahan. Ada proses lobi melalui sistem informal. Bahkan, Agus Susanto sebagai pembina komunitas Kampung Hijau Gambiran berpendapat:

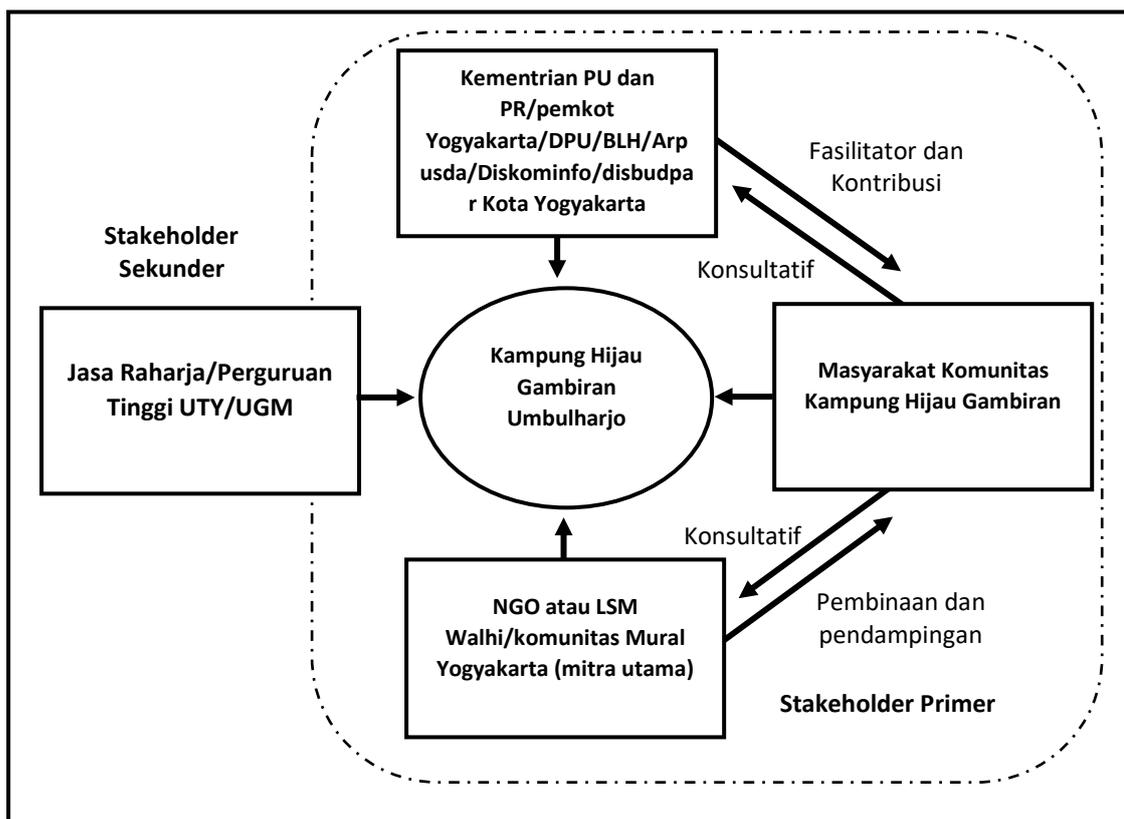
“Untuk melalui jalan formal seperti surat menyurat dan proposal dalam memperoleh pendanaan pemerintah itu cukup sulit bahkan jujur kami tidak mampu membuat itu karena keterbatasan sumber daya manusia. Ketika melalui dewan kita akan masuk dalam pusaran politik yang mungkin ada persyaratan-persyaratan politik juga. Maka dalam membangun kemitraan kami melalui diskusi kecil-kecilan dengan mengundang kepala dinas dan orang-orang memiliki otoritas dinas yang selaras dengan program yang akan kami kerjakan”.

Berikutnya, untuk *stakeholder* primer ketiga yaitu lembaga swadaya masyarakat dan organisasi non pemerintah atau LSM lingkungan, seperti Walhi Yogyakarta, Kophi Yogyakarta dan Komunitas Mural Yogyakarta sebagai mitra utama. *Stakeholder* tersebut merupakan kelompok yang berhubungan langsung dengan aktivitas Kampung Hijau Gambiran. Turut serta dalam proses konsultatif dan pendampingan secara rutin. Unsur ini cukup mempengaruhi kelangsungan inovasi dan kegiatan Kampung Hijau, walau tidak melalui metode pelatihan dan *workshop* resmi. Namun, masukan dan saran dari kelompok ini menjadi hubungan serta jalinan yang intens dilakukan oleh komunitas Kampung Hijau Gambiran.

Disamping ketiga *stakeholder* primer diatas ada *stakeholder* sekunder yang turut serta berpengaruh secara tidak langsung dalam pengelolaan lingkungan hidup Kampung Hijau Gambiran. Dalam hal ini unsur keberadaan pihak swasta tidak terlalu intens dilakukan. Kedudukan *stakeholder* sekunder dirasa tidak mempengaruhi secara signifikan dari keberlangsungan dalam pengembangan Kampung Hijau Gambiran. Menurut Agus pihak komunitas Kampung Hijau dalam beberapa hal tetap menjalin secara rutin dalam hubungan komunikasi konsultatif

dari *stakeholder* sekunder, seperti dengan perguruan tinggi Universitas Teknologi Yogyakarta dan Universitas Gajah Mada. Mengacu keterlibatan *stakeholder* sebagaimana hasil temuan di lapangan maka dapat digambarkan peta kolaborasi yang selama ini terjalin di Kampung Hijau Gambiran pada gambar berikut:

Gambar 3.2. Keterlibatan *Stakeholder* dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran



Sumber : Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

Mengacu pada karakteristik kerjasama partisipasi yang dikembangkan oleh Mitchell et. al. (2003) dapat diketahui bahwa kelompok pemerintah dan LSM memiliki andil dalam seluruh kerjasama strategik yaitu *support sharing* (kontribusi) menyalurkan dana untuk suatu program, *advisory* atau konsultatif dengan memberikan masukan kebijakan dan strategi, serta *working sharing* dengan

berkejasama dan bertukar informasi. Bahkan adanya pemerintah dan LSM diluar komunitas mampu meningkatkan efektivitas pembuatan keputusan (*Decision Making*) hingga eksekusi program dan kegiatan. Melalui identifikasi keterlibatan *stakeholder* diperoleh temuan bahwa pada agenda yang akan datang komunitas Kampung Hijau Gambiran masih didominasi oleh keterlibatan pemerintah dan organisasi non-pemerintah (LSM lingkungan) sebagai berikut:

Tabel 3.17. Rencana Agenda Program Kampung Hijau

No	Stakeholder	Organisasi	Keterlibatan
1	Pemerintah	Dinas Informatika dan Telekomunikasi Kota Yogyakarta	Membangun cinema pada balai perpustakaan guna menarik minat anak-anak untuk berkunjung dan belajar
2	LSM	Komunitas Kophi Yogyakarta	Pendampingan dan konsultatif

Sumber : Hasil Wawancara dan Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

Implikasi kolaborasi pemangku kepentingan dalam perspektif kemitraan menjadikan komunitas Kampung Hijau Gambiran mencapai tujuan dengan lebih efisien sehingga kawasan tersebut tertata dengan lebih baik. Setidaknya capaian tersebut menimbulkan beberapa dampak positif jika dilihat dari sudut bidang sosial budaya, politik, ekonomi dan lingkungan. Pada aspek sosial seperti perubahan kesadaran yang terjadi pada masyarakat Kampung Hijau Gambiran mengakibatkan masyarakat menjalin komitmen bersama, penguatan partisipasi dalam berinovasi, mengutarakan pendapat pada pertemuan rutin komunitas dan mempererat komunikasi guna mencapai keberlangsungan budaya ramah terhadap lingkungan lewat kelompok kerja. Kebersamaan masyarakat dalam mengelola lingkungan,

mobilitas bersama dan akses sumberdaya masyarakat seperti tenaga, waktu, dana swadaya, pengetahuan, pengalaman dan loyalitas.

Kepadatan penduduk yang kian meningkat pada daerah perkotaan Yogyakarta tentu mempengaruhi kualitas kota. Sampah limbah dan pola hidup yang semakin tidak terkendali mengancam kesehatan penduduk perkotaan. Hilangnya *public space* dan ruang terbuka hijau untuk publik akibat laju pembangunan kota yang tidak terkendali sehingga tidak terkecuali bagi Kota Yogyakarta untuk memusatkan perhatian pada upaya pelestarian lingkungan melalui beberapa kampanye lingkungan seperti *Green City*, *Green Community* dan *Smart City*. Munculnya komunitas Kampung Hijau Gambiran untuk memperbaiki lingkungan wilayah perkotaan dengan didasarkan atas inisiatif masyarakat (prakarsa lokal) tentu memberikan citra positif bagi Kota Yogyakarta. Dalam hal ini dapat diartikan adanya fenomena kemitraan muatuliastik karena semua aktifitas dan capaian yang dimiliki oleh komunitas memunculkan makna baru bagi Kota Yogyakarta sebagai kota ramah lingkungan dalam arti menyumbang presentase ruang terbuka hijau bagi Kota Yogyakarta dengan menempatkan masyarakat sebagai basis pelestarian lingkungan.

Selain menjadikan *Gajah Wong Educational Park* sebagai wisata lingkungan ditengah perkotaan. Kampung Hijau Gambiran menyediakan biogas sebagai alternatif bahan utama dalam mengolah makanan bagi masyarakat. Sehingga hal tersebut dapat membantu menurunkan pengeluaran keluarga dan meningkatkan pendapatan melalui penjualan berbagai kerajinan tangan dari sampah

dan ekonomi kreatif. Disisi lain, upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan masyarakat Kampung Hijau Gambiran memberikan pengaruh positif bagi keberlanjutan lingkungan perkotaan Yogyakarta, ketersediaan ruang terbuka hijau dan penataan sempadan Sungai Gajah Wong. Inisiatif ini dilengkapi dengan sistem baik dalam membangun kemitraan sehingga mendapat perhatian dari pemerintah, akademisi dan pihak swasta dengan diturunkannya beberapa fasilitas maupun berbagai sumber daya guna mengembangkan kawasan ini.

3.1.3 Keterlibatan *Stakeholder* dalam Perspektif Jejaring (*networking*)

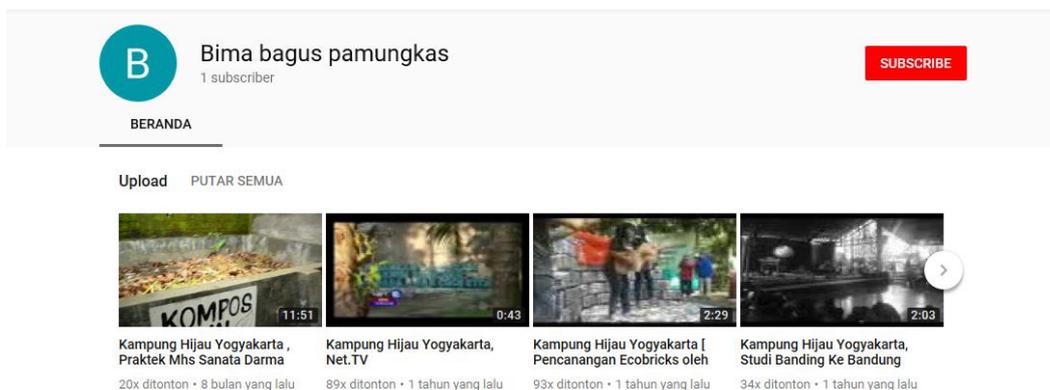
Guna membangun jejaring yang luas dalam rangka mengkampanyekan kegiatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan komunitas Kampung Hijau Gambiran beberapa kali mengadakan festival budaya tahunan seperti *Festival Gajah Wong*. *Festival Gajah Wong* merupakan event perkumpulan masyarakat yang tergabung dalam komunitas pelestari dan pemerhati sungai Gajah Wong Yogyakarta. Selain itu, ada pula *Merti Kampung Gambiran* yaitu festival seni gabungan yang terdiri dari lima RT pada kawasan RW 08 Gambiran. Selain melalui festival budaya dan pertunjukan, untuk memperluas jaringan Kampung Hijau Gambiran juga memiliki media daring *website*, *facebook*, *twitter*, *youtube* dan media sosial lainnya. Namun, karena minimnya sumber daya manusia dan kemampuan yang dimiliki masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran sehingga untuk mengelola *website* dan media sosial tersebut masyarakat cukup kesulitan, lambat laun *website* tersebut tidak diperpanjang dan hilang.

Agus Susanto (2017) menjelaskan bahwasannya:

“Kita beberapa kali punya website, karena kita terfokus kegiatan luar untuk mengelola *website* tidak tercakup dan waktunya tidak cukup lagi. Sampai *website* itu mati dan hilang, untuk memperpanjang sudah tidak bisa lagi harus mendesain lagi *website* yang baru. Namun, kami aktif dalam mengampanyekan acara-acara Kampung Hijau dan pelestarian lingkungan melalui youtube pribadi saya dan anak saya”.

Tidak hanya Kampung Hijau Gambiran, berdasarkan penelusuran penulis ke kelompok kerja Sampah Mandiri “Asri” Kampung Hijau Gambiran telah memiliki media sosial *Facebook*. Selain media sosial *facebook* dan *twitter* Kampung Hijau Gambiran juga memiliki media daring seperti *youtube*. *Channel Youtube* tersebut dikelola oleh anak Agus Susanto, dalam beberapa unggahan video membahas tentang perjalanan Kampung Hijau Gambiran, aktivitas kelompok kerja dan festival seni Gambiran.

Gambar 3.4. Media Daring Youtube Komunitas Kampung Hijau Gambiran

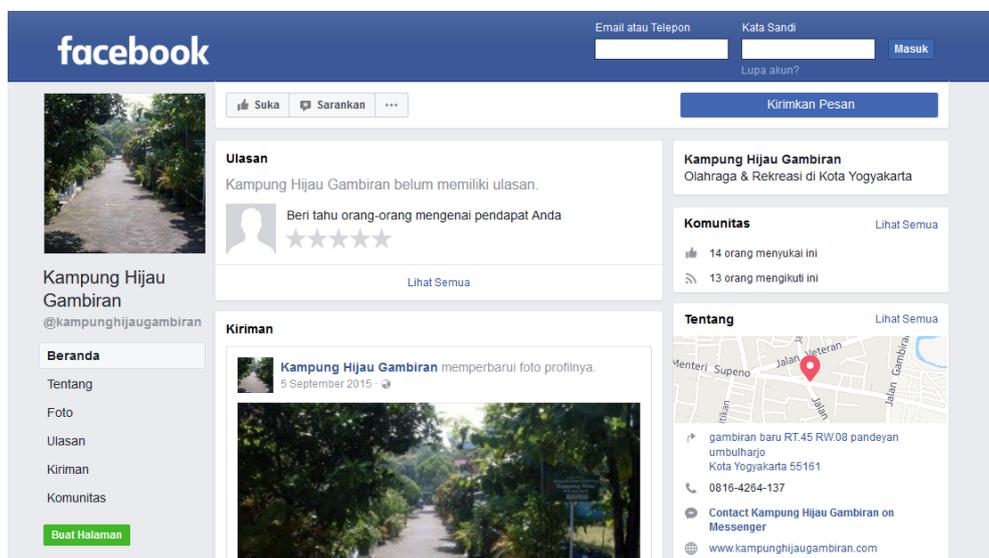


Sumber: <https://www.youtube.com/channel/UCW-GUk7iqXQz7w4JDy9mD2A>

Namun, menurut Agus (2018) karena prinsip mengelola media *online* tersebut tanpa imbalan “kerja sosial” maka cukup sulit untuk mengampanyekan kegiatan secara berkelanjutan dan *update*. Sedangkan untuk media *offline*, Kampung Hijau

Gambiran aktif membuat beberapa brosur, poster dan berita lokal hingga Nasional yang berisi tentang kegiatan maupun prestasi-prestasi. Bahkan komunitas Kampung Hijau Gambiran pernah diundang untuk menjadi tamu pada acara “bukan empat mata” Trans 7. Secara keseluruhan komunitas Kampung Hijau Gambiran percaya bahwa media *online* maupun *offline* jika dikelola dengan baik dan teratur mampu membangun jejaring hingga dapat menyampaikan pesan lebih efektif dan efisien. Berikut ini adalah tampilan beberapa media *online* yang dimiliki Kampung Hijau Gambiran;

Gambar 3.3 Media Daring Facebook Komunitas Kampung Hijau Gambiran



<https://facebook.com/kampunghijauGambiran/>

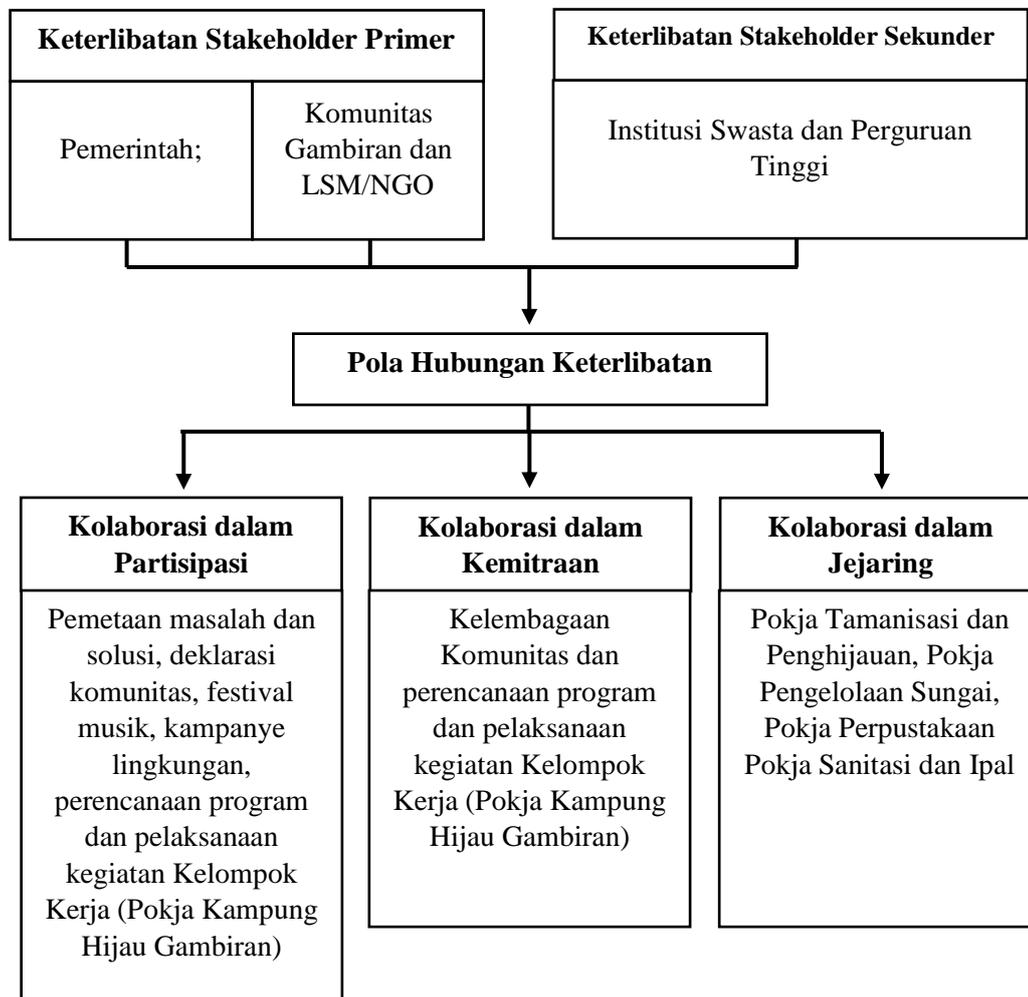
Dalam beberapa kesempatan komunitas Kampung Hijau Gambiran menjalin kerjasama dengan institusi perguruan tinggi. Namun, kerjasama tersebut tidak dalam berbetuk kesepakatan MoU resmi, hanya sebatas penelitian hibah, pemberdayaan dan pembuatan video dokumentasi kegiatan kelompok kerja, seperti Institut Seni Indonesia (dokumentasi berdirinya Kampung Hijau), Universitas

Ahmad dahlan (dokumentasi Kelompok Kerja Sampah Mandiri Asri), Universitas Teknologi Yogyakarta (pemetaan kawasan), Universitas Gajah Mada (pengelolaan sanitasi dan Instalasi Pengelolaan Air Limbah), Universitas Sanata Daharma (pengolahan sampah menjadi kerajinan tangan) dan turut menjalin kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lainnya seperti Poltekes, Universitas Islam Indonesia dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Yogyakarta).

Dalam hubungan kolaborasi *governance* konteks jejaring (*networks*) merupakan proses lebih lanjut dari hubungan partisipasi dan kemitraan. Pada tahap ini terjadi prinsip ketergantungan para aktor pemangku kepentingan, berubahnya batasan-batasan negara, swasta dan masyarakat sipil serta pertukaran sumberdaya dan kapasitas menjadi sangat penting. Sehingga ketidakhadiran salah satu instrumen pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan dapat mempengaruhi ketercapaian tujuan. Intensitas hubungan kerjasama yang tidak terorganisir tersebut mengakibatkan tidak dapat terprediksi kunjungan kerjasama antara pihak komunitas dan pihak dari luar komunitas. Pada beberapa kesempatan kesuksesan pengelolaan *Gajah Wong Educational Park* menjadi media pembelajaran bagi berbagai pihak. Tamu-tamu dari kota lainnya yang berkunjung ke komunitas lebih cenderung ke arah studi banding biasa. Ada beberapa tamu penting yang rutin namun jadwal kunjungan tidak dapat ditentukan seperti dr. Aoki salah satu peneliti dari universitas di Jepang memiliki latar belakang antropologi budaya rutin hampir setiap tahun berkunjung. Adapun keterlibatan *stakeholder* melalui upaya kolaborasi

dalam partisipasi, kemitraan dan jejaring di Kampung Hijau Gambiran dapat dijelaskan pada gambar berikut ini;

Gambar 3.5. Model Kolaborasi dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran



Sumber: Analisis Penulis, 2017.

Dari gambar diatas dapat menerangkan bahwa kolaborasi dalam partisipasi Kampung Hijau Gambiran telah terjadi semenjak awal pemetaan masalah dilanjutkan dengan deklarasi komunitas dan pelebagaan hingga sampai pelaksanaan kegiatan kelompok kerja. Adanya kolaborasi kemitraan lebih cendrung

dalam penguatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumberdaya manusia dan pengadaan sarana, perasarana dan sumber daya fisik pada kegiatan kelompok kerja (Pokja Kampung Hijau Gambiran). Sedangkan tingkat kolaborasi paling erat jejaring terjadi pada pelaksanaan program Pokja Tamanisasi dan Penghijauan, Pokja Pengelolaan Sungai, Pokja Perpustakaan Pokja Sanitasi dan Ipal, karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh komunitas Kampung Hijau Gambiran sebagai salah satu pemangku kepentingan. Sehingga, pada prinsip ini kehadiran pemerintah pun penting dalam mengelola kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan internal melalui penekanan pemberdayaan atas inisiatif masyarakat sebagai inti sumber daya pembangunan.

3.2 Intensitas Hubungan *Stakeholder Collaborative Governance* dalam Pengelolaan Kampung Hijau Gambiran

Mengadaptasi konsep hubungan *collaborative governance* yang dikembangkan oleh Zaenuri (2016:47) maka dapat diidentifikasi hubungan yang terjadi pada *stakeholder* dalam pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Hubungan tersebut mengisaratkan adanya intensitas yang berbeda mengacu pada hubungan resiko manjerial, bentuk aktifitas, orientasi dan keterlibatan *stakeholder*. Dari hasil temuan serta analisis penulis hubungan pilar *governance* dalam berkolaborasi mengelola Kampung Hijau Gambiran dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18. Intesitas Hubungan Pilar *Governance* dalam Berkolaborasi

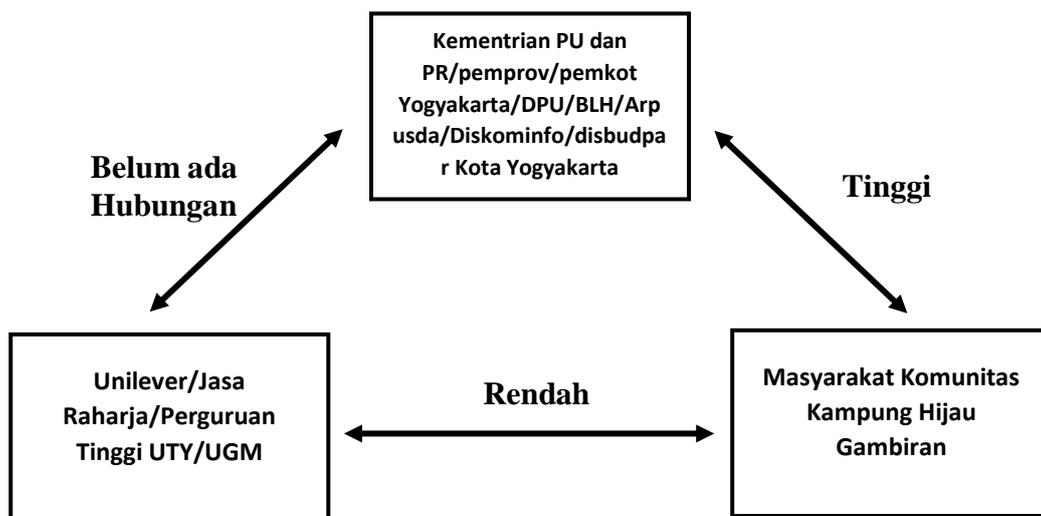
Dimensi	Pemerintah-Masyarakat	Pemerintah-Swasta	Swsata-Masyarakat
Resiko Manjerial	Memiliki resiko manajerial yang tinggi;	Belum memiliki hubungan manajerial;	Memiliki resiko manajerial yang sangat rendah;
Bentuk Aktivitas	Bantuan dana program dan pendampingan teknis;	Belum memiliki hubungan aktivitas;	Bantuan dana dan pendampingan;
Orientasi	Praktis	-	Praktis
Keterlibatan Stakeholder	Pada perencanaan, implemtasi dan pengelolaan;	-	Pada implementasi
Kategori	Tinggi	-	Rendah

Sumber: Analisis Data Primer dan Sekunder.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui variasi hubungan dari ketiga *stakeholder*. Adanya indikasi bahwa masyarakat yang tergabung dalam komunitas Kampung Hijau Gambiran masih menjadi pemain utama dalam pengelolaan, institusi pemerintah sebagai fasilitator dan tidak ada hubungan yang erat antara institusi pemerintah dan institusi swasta. Sedangkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat relatif tinggi. Pada tahapan pengelolaan Kampung Hijau Gambiran memang ditemukan kemitraan yang erat dan permanen antara pemerintah dan masyarakat Kampung Hijau Gambiran. Bahkan, dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki pihak atau bagian khusus dalam struktur organisasi perangkat daerah untuk bertanggungjawab dalam mengembangkan dan menaungi komunitas ini.

Sehingga temuan tersebut mengungkapkan, bahwa fenomena kolaborasi dapat menjadi ajang berbagi kreasi dan inovasi bagi pilar *governance* untuk mengelola Kampung Hijau Gambiran. Agar lebih mudah memberikan gambaran tentang intensitas hubungan antara ketiga *stakeholder* maka dapat dijelaskan melalui gambar berikut;

Gambar 3.6. Intesitas Hubungan antar *Stakeholder*



Sumber: Hasil analisis, 2017.

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat menjelaskan bahwa dalam pengelolaan Kampung Hijau belum adanya hubungan istimewa antara institusi swasta dan institusi pemerintah karena lebih cenderung disebabkan tidak ada motivasi bisnis dan profit pada pengelolaan Kampung Hijau Gambiran. Seperti halnya dikemukakan oleh Dwiyanto (2015:286) bahwa motivasi utama institusi bisnis melakukan kemitraan terhadap pemerintah karena memungkinkan untuk mengakses sumberdaya pemerintah untuk mengatasi sejumlah permasalahan publik, seperti lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang juga menjadi

kepentingan pelaku bisnis itu. Sebagai contoh perusahaan yang kegiatan produksinya seringkali menimbulkan permasalahan lingkungan mereka dituntut untuk melakukan rehabilitasi lingkungan tentu dengan merekrut sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah. Selain dituntut dalam bentuk materiil, juga memberikan bertanggung jawaban sosial seperti pemberdayaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat. Sehingga kerjasama antara swasta dan pemerintah mendorong berlangsungnya transfer strategi, teknologi, dan informasi bagi kedua belah pihak.

Sedangkan masyarakat Kampung Hijau Gambiran meyakini degradasi lingkungan, bencana alam dan wabah penyakit yang terjadi pada waktu yang lalu tidak sepenuhnya tanggungjawab dari implikasi fenomena kapitalisme yang ada di Kota Yogyakarta dan aktivitas ekonomi semata. Ada pemahaman bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi merupakan kelalaian masyarakat sendiri. Hubungan intensitas antara masyarakat komunitas Kampung Hijau Gambiran dan pemerintah yang tinggi lebih banyak disebabkan oleh legitimasi sosial dan politik dari mekanisme kegiatan pemerintahan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3.3 Kampung Hijau Gambiran dalam bingkai *Civil Society* pada Dimensi Lingkungan Perkotaan

Perez Diaz menekankan makna *civil society* pada keadaan masyarakat yang telah mengalami pemerintahan yang terbatas, kebebasan, ekonomi pasar dan

timbulnya asosiasi-asosiasi masyarakat yang mandiri dimana satu sama lainnya saling menopang (Gaffar, 2002:179). Disamping itu ada pula pandangan yang memberikan makna pada *civil society* sebagai sebuah masyarakat yang memiliki peradaban (*civil*) yang dibedakan dari masyarakat yang tak beradab atau barbarian seperti yang dikemukakan oleh Cristhopher Bryant.

Oleh karena itu *civil society* merupakan suatu bentuk hubungan antara Negara dengan sejumlah kelompok sosial misalnya keluarga, kalangan bisnis asosiasi masyarakat dan gerakan sosial yang ada di dalam Negara. Namun sifatnya *independent* terhadap Negara. Tentu saja menurut Eisenstadt masyarakat tersebut bukanlah masyarakat yang mudah diartikan. Masyarakat tersebut memiliki komponen tertentu sebagai syarat akan *civil society* antara lain, otonomi, akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang bersifat otonom dan arena publik tersebut terbuka bagi semua lapisan masyarakat (Gaffar, 2002:179).

Semua komponen yang telah disebutkan pertama hingga terakhir syarat akan *civil society* layak untuk dikaitkan dengan komunitas Kampung Hijau Gambiran. Selain memiliki kemampuan yang otonom dalam arti hubungan antara komunitas ini dengan negara atau pemerintah hanya sebatas fasilitator saja. Masyarakat Kampung Hijau juga memiliki akses terhadap lembaga Negara. Dalam konteks hubungan antara Negara dan masyarakat, setiap warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, memiliki akses terhadap Negara. Artinya secara luas individu dapat melakukan partisipasi politik dengan pejabat atau menyampaikan aspirasi dan *uneg-uneg* mereka. Bahkan sampai dengan cara

mengampanyekan agar kasus mereka dapat diperhatikan oleh masyarakat secara luas. Kemudian lebih dari itu kalangan pemerintah harus memberikan komitmen untuk mendengar menerima keluhan dan aspirasi tersebut dan diteruskan menjadi sejumlah langkah yang konkret.

Setelahnya, syarat *civil society* yang lainnya masyarakat harus memiliki arena publik yang otonom (*a free public sphere*) (Hikam,1996:198) untuk dapat mengembangkan dirinya sendiri, memungkinkan untuk membentuk opini publik (Hamzah, 2015:467), dapat melakukan secara leluasa tanpa tergantung hegemoni, dominasi dan perasaan takut. Syarat yang terakhir memungkinkan *civil society* memiliki arena yang terbuka artinya *civil society* memiliki ruang terbuka bagi seluruh masyarakat, tidak dijalankan secara rahasia, eksklusif dan *setting* bersifat korporatif. Wilayah bebas menjadi kebutuhan *civil society* untuk menetapkan komitmen demi Negara yang lebih baik. Wilayah harus steril dari kepentingan keluarga dan kekuasaan Negara (Hamzah, 2015:557). Disinilah titik pertemuan antara masyarakat sipil dan demokrasi. Masyarakat dapat mengetahui apa saja yang terjadi disekitar lingkungannya kehidupannya bahkan ikut terlibat di dalamnya. Secara khusus Fahri Hamzah menyebutkan bahwa fungsi *civil society* pada suatu Negara sebagai fungsi simbolik, partisipasi, politik dan pembangunan.

Pada fungsi simbolik, LSM atau NGO tersebut bisa berperan sebagai figur yang dekat dengan masyarakat, loyal dan mencerminkan fungsi masyarakat. Relasi sejajar memungkinkan berbagai pihak untuk melibatkan rasio komunikatif dalam menentukan pilihan kebijakan, ditengah kedigdayaan penguasa yang seringkali

lebih memilih jalur birokratis. Pada tingkat politik *civil society* menjadi wadah perjuangan politik massa melalui jalur non-formal. Emoh politik yang sedang diidap sebagian masyarakat boleh jadi disebabkan karena kejenuhan atas sikap pemerintah yang cenderung mementingkan urusan mereka sendiri. Legitimasi dan fasilitas kekuasaan bisa dimanfaatkan secara otoriter dan memanipulasi kepentingan pribadi seolah kepentingan bersama. Sedangkan asumsi pembangunan masyarakat seharusnya bersumber pada kepuasan masyarakat sendiri. Pembangunan masyarakat tidak hanya sekedar *top-down* namun lebih bersifat *bottom-up*. Masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan sendiri dan memproduksi produk sosial dan ekonomi yang bisa menjamin terpenuhi kebutuhan hidup mereka.

Melihat kapasitasnya yang mampu mengisi ruang publik, dengan melakukan partisipasi politik, memperbaiki tatanan ekonomi dan sosial maka secara tegas Ghaffar (2002) memosisikan *civil society* sebagai NGO/ LSM. Kehadiran *civil society* dalam masyarakat mampu melengkapi kapasitas negara yang terbatas. Tidak semua kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Terkadang isu-isu yang menjadi tugas Negara untuk mengaturnya serta menyelesaikan tidak berjalan dengan baik. Lain dari itu, bukan suatu yang aneh jika *civil society* demikian NGO dan LSM merupakan *the best provider*. Bahkan tidak jarang *civil society* menjadi pesaing dan penantang keberadaan Negara.

Pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan, mengakibatkan peningkatan terhadap produksi massal yang berimbas pada konsumsi massal. Konsumsi massal

yang berlebih akan mempengaruhi jumlah timbunan sampah yang semakin hari semakin menumpuk ditandai dengan adanya pertumbuhan penduduk, arus urbanisasi, meningkatnya kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. (Sumarno, 2017:3). Selain itu, diperparah dengan pola kebiasaan hidup praktis masyarakat urban membuang sampah sembarangan. Banyak kota di Indonesia telah berusaha mengembangkan diri untuk lebih ramah terhadap lingkungan. Aksi kolektif maupun prakarsa lokal menunjukkan perubahan sikap terhadap permasalahan lokal dimulai dari skala individu maupun kelompok tertentu. Mewujudkan kampung hijau pada wilayah perkotaan ditandai dengan adanya perilaku ramah lingkungan yaitu pada penggunaan air secara hemat, pengelolaan air hujan, teknologi hijau, penghematan sumber energi, serta penghijauan (Laila, 2014:289).

Pembentukan gerakan sosial pada isu limbah sampah perkotaan semakin meluas di wilayah Indonesia akibat bias dari industrialisasi massal yang cenderung sulit dikendalikan. Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 mencerminkan reaksi dari suatu kelompok masyarakat bantaran Sungai Winongo Yogyakarta (Endang, 2016). Kemunculan gerakan sosial Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) yang terkait dengan permasalahan lingkungan kawasan perkotaan ini menjadi kritikan tajam bagi pemerintah setempat karena belum mampu memberikan solusi yang tepat menyelesaikan isu lingkungan perkotaan. Ketua FKWA, Ny. Endang Rohjani menuturkan bahwa masyarakat khususnya di tepi Sungai Winongo memahami betul akan arti penting penataan guna menciptakan permukiman yang baik, manusiawi, dan layak huni (PSKK, 2016).

Tak dapat disangkal bahwa Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) merupakan komunitas peduli Sungai Winongo yang telah melakukan berbagai langkah besar sehingga Sungai Winongo tidak lagi menjadi kawasan kumuh dan identik dengan tempat pembuangan sampah. Selain itu, Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) pada tahun 2011 melakukan serangkaian edukasi seperti M3K “*mungguh, madep, mundur*” bagi warga sempadan sungai agar tidak menjadikan sungai sebagai bagian belakang rumah, tetapi menjadi bagian halaman rumah warga. Berbagai perencanaan dilakukan FKWA, termasuk telah membuat *Grand Design Winongo Wisata 2030* penataan di beberapa titik koridor sempadan dan bantaran Sungai Winongo melalui pendekatan pariwisata (sebagai tempat wisata). Sungai Winongo yang mengalir dari utara ke selatan dan melewati 6 kecamatan di Kota Yogyakarta, sehingga memiliki prospek yang mendukung untuk dijadikan sebagai tempat wisata air dan kawasan pusat kebudayaan Yogyakarta.

Keberadaan Kampung Hijau Gambiran yang mampu mengisi kekosongan ruang menggantikan tugas dari Negara dalam mengelola lingkungan perkotaan. Hubungan antara pemerintah dan Kampung Hijau Gambiran tidak dapat dipisahkan. Secara teknis maupun substantif pemerintah mengakui keberadaan Kampung Hijau Gambiran. Jelas hubungan antara keduanya harmonis saling melengkapi dan menopang satu sama lain. Sehingga setidaknya komunitas Kampung Hijau Gambiran memandang pemerintah sebagai *Facilitation/Promotion* (Ryker dalam Ghaffar, 2002:208) atau pola hubungan demokratis (sejajar). Pemerintah Kota Yogyakarta tingkat Kelurahan Pandeyaan memberikan dukungan organisasional yang besar terhadap legitimasi keberadaan komunitas Kampung

Hijau Gambiran dengan dikeluarkan SK Kepengurusan Organisasi. Selain itu, adanya dukungan finansial *Matching Grants* dalam melaksanakan program kelompok kerja dari pemerintah kota melalui otoritas kedinasan. Pemerintah memfasilitasi terselenggaranya forum untuk menyatukan pemerintah dan NGO dalam satu tujuan bersama.

Sedangkan pemerintah memandang orientasi Kampung Hijau Gambiran sebagai *High level partnership: Grassroots Development* (Ryker dalam Ghaffar, 2002:212). Pada beberapa kegiatan komunitas ini lebih terpusat pada pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Tidak memiliki minat pada hal yang bersifat politis, namun, dalam beberapa temuan komunitas ini turut aktif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah khususnya dalam pengelolaan lingkungan di tingkat lokal. Seringkali terlibat dalam kegiatan kampanye kearifan lokal, budaya yang dikemas dalam pesan menjaga lingkungan. Berupaya untuk menyatukan pemahaman serta jejaring komunitas lainnya pada tingkat *grassroots* serta berusaha mengakar pada masyarakat *Middling Grassroots* (Hamzah, 2010). Lain hal dengan hubungan antara Kampung Hijau Gambiran dengan sektor swasta yang hanya sebatas *partisipatif*, secara alamiah komunitas ini memberi ruang bagi instansi swasta untuk terlibat namun tetap mengedepankan independensi. Dari beberapa temuan di lapangan dinamika hubungan komunitas ini dengan instansi swasta tidak erat. Bahkan hanya sesekali terjadi hubungan partisipasi.

Menguatnya modal sosial, konsolidasi sosial dan kreatif minoritas (*creative minority*) yang ada pada Kampung Hijau Gambiran menjadi temuan nilai-nilai dan

aktor yang mampu menggeser potret ‘individualistik’ masyarakat perkotaan. Hamzah (2010:271) meyakini bahwa *human capital* sebagai rangkaian kuat dalam menopang tegaknya *civil society*. Banyak masyarakat yang tidak mampu berbuat banyak terhadap permasalahan ekologi yang semakin kompleks (beberapa sungai dan alih fungsi lahan di Kota Jakarta) serta sulitnya beberapa komunitas untuk tetap mempertahankan agenda pelestarian lingkungan karena belum mampu memunculkan kreatif minoritas guna menjaga keberlangsungan jika berhadapan dengan dimensi lingkungan (Godonglayu Lor, Yogyakarta).

Tidak dapat dipungkiri bahwa Kampung Hijau Gambiran merupakan fenomena Masyarakat Madani (Rahardjo, 1999:146) merujuk pada agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya, dan masyarakat kota adalah hasilnya. Dengan demikian Masyarakat Madani mengandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Komunitas Kampung Hijau Gambiran menjadi lokomotif yang mampu membangkitkan swadaya untuk melakukan serangkaian swasembada dan kemandirian (*Civil Society*) (Nasiwan, 2010:162). Tidak akan tergantung penuh kepada Negara, mereka mencoba meningkatkan kualitas hidup dengan mandiri untuk menentukan masa depannya. Tidak hanya itu, Kampung Hijau Gambiran juga sangat menjunjung tinggi nilai *unggah-ungguh* yang berada pada jalur kebajikan menimbulkan dampak positif dan mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Rumusan perjalanan kemandirian Kampung Hijau Gambiran tidak lepas dari tuntutan akan eksistensi organisasi yang otonom selalu mengembangkan

kreatifitas secara bebas namun tetap mengacu pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Terlepas dari proses kolaborasi pemangku kepentingan yang terjadi pada Kampung Hijau Gambiran maka pada bagian ini penulis berupaya untuk membahas fase komunitas Kampung Hijau Gambiran dalam mengelola lingkungan mengacu pada tahapan gerakan sosial yang dikembangkan oleh Christiansen (dalam Yuanjaya 2015:62) melalui sedikit penyesuaian dari penulis yaitu;

1. Tahap kemunculan (*emergence*) individu merasa tidak puas dan tidak nyaman dengan keadaan yang ada, baik karena disebabkan kebijakan atau kondisi sosial tertentu, tetapi mereka tidak mengambil tindakan dan bergerak secara individu (Yuanjaya 2015:62).
2. Tahap kolaborasi (*collaboration*), perasaan ketidakpuasan menjadi kolektif dan mulai mengorganisir dan membuat strategi (Yuanjaya 2015:62).
3. Tahap formalisasi (*bureaucratization*), gerakan telah memiliki karakteristik sebagai organisasi (Yuanjaya 2015:62), adanya upaya legitimasi yang dilakukan melalui pengakuan-pengakuan dari instansi diluar komunitas.
4. Tahap Kemunduran (*decline*), berupa: represi, kooptasi, keberhasilan, dan kegagalan.

Untuk menghindari bias pada tahap keempat maka menggunakan istilah “kemunduran”. Sejauh mana komunitas ini mampu berdiri secara otonom, memiliki cita-cita mandiri dan memiliki arah untuk otonom, namun belum sepenuhnya dapat berdiri sendiri.

Tabel 3.19. Fase Komunitas Kampung Hijau Gambiran

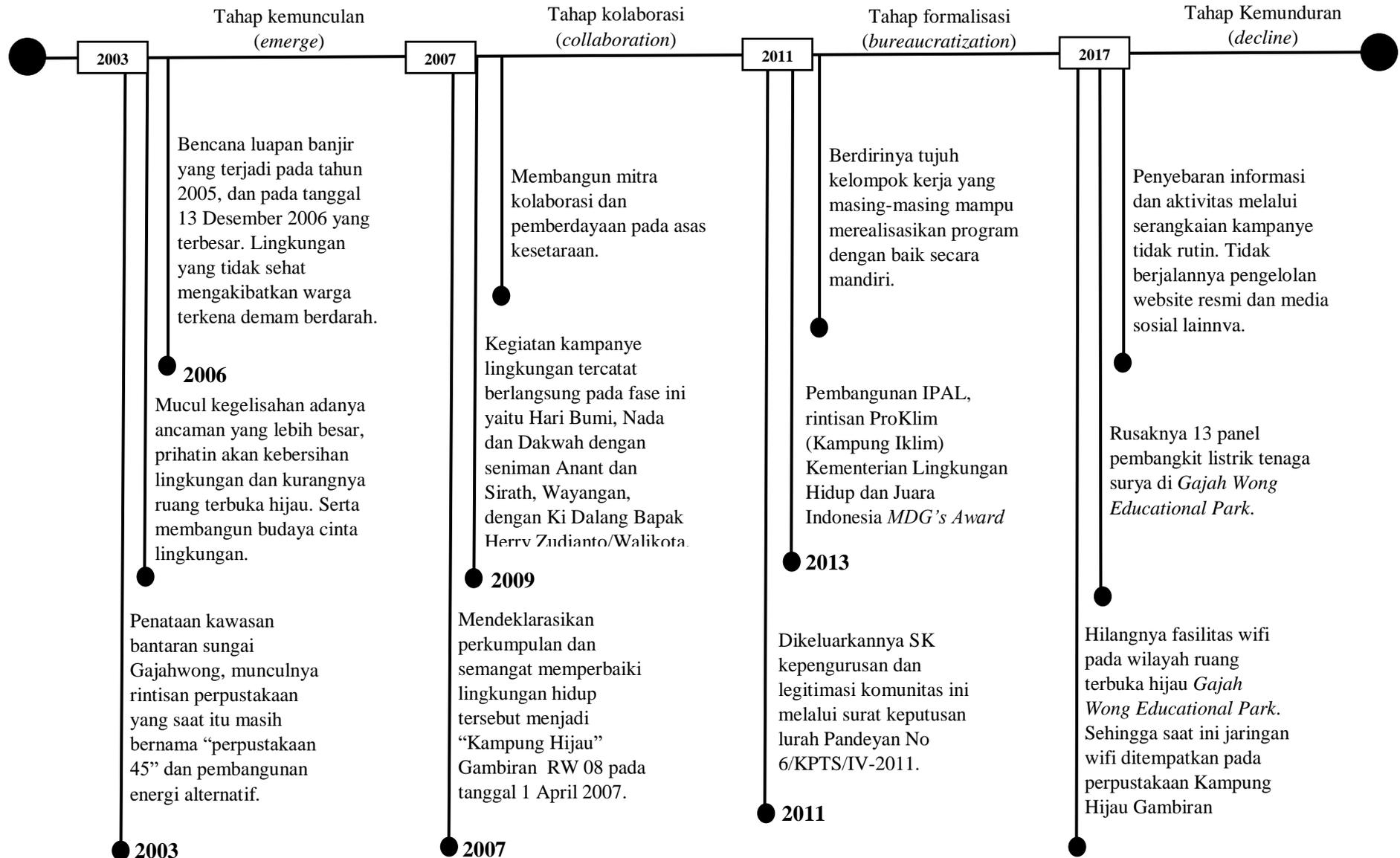
No	Tahun	Fase kegiatan	Kecendrungan
1	2003-2005	Tahap kemunculan (<i>emerge</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditandai dengan munculnya bencana terutama luapan banjir yang terjadi pada tahun 2005, dan pada tanggal 13 Desember 2006 yang terbesar. 2. Lingkungan yang tidak sehat mengakibatkan warga terkena demam berdarah. 3. Membangun budaya baru peduli terhadap lingkungan melalui pembentukan Kampung Hijau dengan “asas kebersamaan”. 4. Penataan kawasan bantaran sungai Gajah Wong. 5. Munculnya rintisan perpustakaan yang saat itu masih bernama “perpustakaan 45”. 6. Pembangunan energi alternatif.
2	2006-2010	Tahap kolaborasi (<i>collaboration</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeklarasikan perkumpulan dan semangat memperbaiki lingkungan hidup tersebut menjadi “Kampung Hijau” Gambiran RW 08 pada tanggal 1 April 2007. 2. Kegiatan kampanye lingkungan tercatat berlangsung pada fase ini yaitu, Hari Bumi 22 April 2006 melibatkan PPLH Regional Jawa dan WALHI DIY dengan mendatangkan Seniman Lingkungan Franky Sahilatua. 3. Nada dan Dakwah dengan seniman Anant dan Sirath. 4. Wayangan 25 Agust 2008 dengan Ki Dalang Bapak Herry Zudianto/Walikota dan Bapak Ir. Eko Suryo, M. serta Kepala Kimpraswil Kota Yogyakarta.

			5. Pentas seni dengan seniman Sawung Jabo 2009.
3	2011-2015	Tahap formalisasi (<i>bureaucratization</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dikeluarkannya SK kepengurusan dan legitimasi komunitas ini melalui surat keputusan lurah Pandeyan No 6/KPTS/IV-2011 tertanggal 22 April 2011. 2. Pembangunan IPAL 3. Rintisan ProKlim (Kampung Iklim) Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2012. 4. Juara Indonesia <i>MDG's Award</i> pada tahun 2013.
4	2016-sekarang	Tahap kemunduran (<i>decline</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahap keberhasilan komunitas Kampung Hijau ditandai dengan menjadi inspirasi bagi komunitas kampung hijau dan pemerhati sungai lainnya di Yogyakarta dan Indonesia. 2. Berdirinya tujuh kelompok kerja yang masing-masing mampu merealisasikan program dengan baik secara mandiri. 3. Merencanakan beberapa program lainnya dengan memosisikan diri terhadap lembaga lain atau instansi lain sebagai “mitra kerja” atau “sharing ilmu dan pengalaman”.

Sumber : Hasil Analisis Lapangan Peneliti, 2017.

Untuk memperlihatkan secara jelas fase komunitas Kampung Hijau Gambiran Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada table diatas, maka penulis mencoba untuk menyusun fase tersebut dalam bentuk bagan sebagai berikut:

Gambar 3.7. Fase Komunitas Kampung Hijau Gambiran Yogyakarta



Melalui table serta bagan di atas dapat dijelaskan bahwa, fase yang terjadi pada komunitas Kampung Hijau Gambiran sesuai dengan rencana yang dicita-citakan. Setiap fase memunculkan kegiatan yang menjadi poros penanda perubahan bagi Kampung Gambiran. Namun, setiap fase tersebut bukan berarti tanpa kendala dan permasalahan, berikut penulis mencoba merangkum permasalahan krusial yang dihadapi komunitas Kampung Hijau Gambiran;

Tabel 3.20. Fase dan Kendala yang Dihadapi Komunitas Kampung Hijau Gambiran

No	Tahun	Fase kegiatan	Kendala
1	2003-2005	Tahap kemunculan (<i>emerge</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian besar aktor dan penggagas berdirinya Kampung Hijau Gambiran adalah pendatang, sehingga terjadi penolakan.
2	2006-2010	Tahap koalisi (<i>coalescene</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Menyatukan perbedaan budaya pada masing-masing individu masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak yakin dengan gerakan Komunitas Kampung Hijau, lebih karena disebabkan budaya dan keinginan hidup praktis perkotaan.
3	2011-2015	Tahap kolaborasi (<i>collaboration</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Sulit bagi komunitas Kampung Hijau Gambiran untuk mengikuti berbagai peraturan hukum dan undang-undang pembangunan masyarakat yang cenderung kaku, yang hanya didasarkan prosedural teknokratis dengan kenyataan yang membutuhkan fleksibilitas. Sehingga tujuan pemberdayaan tidak tercapai.
4	2016-sekarang	Tahap kemunduran (<i>decline</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Hilangnya fasilitas pendukung wifi pada wilayah ruang terbuka hijau <i>Gajah Wong Educational Park</i>. Sehingga saat ini jaringan wifi ditempatkan pada perpustakaan Kampung Hijau Gambiran. Rusaknya 13 panel pembangkit listrik tenaga surya di <i>Gajah Wong Educational Park</i> di sisi lain masyarakat tidak mampu untuk memperbaiki dan merawat komponen sel panel surya karena biaya relatif mahal.

			<ul style="list-style-type: none"> • Tidak berjalannya penyebaran informasi melalui pemanfaatan media sosial, website resmi dan kampanye aktivitas Kampung Hijau Gambiran melalui teknologi informasi seperti awal berdirinya komunitas, hal itu disebabkan minimnya sumber daya manusia dan semakin minimnya waktu yang dimiliki masyarakat akibat kegiatan formal.
--	--	--	---

Sumber: Hasil wawancara Agus Susanto, 2017.

Strategi kegiatan Kampung Hijau Gambiran dan taktik protes dibingkai dengan kearifan lokal (*new peaceful movement*) yang memang beririsan dengan kata perlawanan yang anarkis (*warring movement*). Membangkitkan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup perkotaan. Tidak itu saja, studi literatur lainnya menemukan di beberapa komunitas pemerhati sungai Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan budaya hingga pariwisata sebagai framing dalam mengelola lingkungan seperti, Merti Code, Forum Komunikasi Winongo Asri dan Kamunitas Kampung Hijau Gambiran. Walaupun dalam merealisasikan cita-cita tersebut masih mengandalkan dinamika kolaborasi pemangku kepentingan. Artinya, cita-cita untuk mandiri dan independen tetap ada serta terus dijaga. Namun, pandangan pemerintah sebagai *Facilitation/Promotion* dan komunitas Kampung Hijau Gambiran mengusung orientasi sebagai *High level partnership: Grassroots Development* menjadikan fenomena ketergantungan sebagai mitra kerja dan mitra sejajar tak mampu disamakan. Karena dalam beberapa temuan mengisaratkan tujuan pemerintah (Negara) dan komunitas Kampung Hijau Gambiran (*Civil Society*) beriringan dan saling melengkapi.

Berjalannya dinamika kolaborasi antar pemerintah dan komunitas yang diwarnai dengan musyawarah, kesepakatan melalui jalur informal dan proses mengakses jaringan pada lingkaran kekuasaan Negara tanpa menggunakan jalur biokratis cukup menarik. Sekalipun terdapat kecenderungan pemerintah (negara) memiliki gaya teknokratis, prosedural, politis dan kaku. Namun disadari atau tidak kolaborasi ini membuktikan bahwa pemerintah turut andil serta cukup fleksibel dalam memberdayakan gerakan sosial Komunitas Kampung Hijau Gambiran dalam membangun tatanan yang *apik* pada dimensi lingkungan, kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Yogyakarta. Pemerintah harus sadar bahwa dalam pembangunan diperlukan peran *civil society* dalam mitra kerja.

Dari penjelasan diatas ada beberapa catatan peneliti mengenai kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Kampung Hijau Gambiran memiliki kontribusi terhadap pembangunan Kota Yogyakarta. Pemerintah Kota Yogyakarta seharusnya memandang keberadaan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra kerja sejajar dalam menyelesaikan problem-problem aktual perkotaan. Tidak pula cara pandang pemerintah Kota Yogyakarta kepada komunitas Kampung Hijau Gambiran hanya sebagai obyek pembangunan. Selain menjadikan sebagai mitra sejajar, pemerintah perlu juga memposisikan *civil society* sebagai subyek dari serangkaian-serangkaian upaya transformasi sosial atau agenda-agenda perubahan sosial. Bahwa, didalam kehidupan masyarakat urban yang serba individualistik masih terdapat suatu entitas yang kreatif, *sustainable*, dalam beberapa hal memiliki kemampuan *self government* atau *community government* dengan membuat

struktur organisasi sendiri dan pola kerja. Ketika pemerintah kota Yogyakarta berupaya mengelola sumberdayanya namun ada elemen lain diluar pemerintah (negara) yang mengelola sumberdayanya juga. Hal itu dapat membuktikan bahwa pergerakan *self governance* didalam proses kehidupan negara itu ada (*real*) dan menjadi kekuatan dari *civil society* yang berarti dihadapan negara yang masih merasa mendominasi diberbagai banyak tatanan pembangunan masyarakat.

Perlu diapresiasi bentuk kolaborasi antara komunitas Kampung Hijau Gambiran dan Pemerintah Kota Yogyakarta mengingat dalam beberapa kasus dalam konteks relasi antara masyarakat sipil dan negara meskipun masyarakat sipil memiliki sejumlah “kekuatan” untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam lingkaran negara, tetap saja negara menjadi aktor politik yang paling memiliki kekuasaan. Negara tidak hanya menjadi arena perebutan pengaruh dan kekuasaan dari berbagai aktor politik lainnya tapi juga memiliki kekuatan ekonomi seperti modal, kekuatan aparaturnegak hukum dan komunikasi hingga media. Sehingga negara masih ingin mendominasi menjadi aktor tunggal (*government*) dalam struktur sosial. Namun, fenomena pengelolaan Kampung Hijau Gambiran mencerminkan periku pemerintah Kota Yogyakarta yang terbuka telah berubah menjadi *governance* bukan hanya sebatas teori saja. Komunitas Kampung Hijau Gambiran tidak hanya berorientasi membangun kekuatan sendiri dan mandiri tetapi juga memberikan implikasi yang luar biasa terhadap pembangunan, perbaikan kehidupan yang layak, mengatasi permasalahan lingkungan dan tentu saja proses demokratisasi di Yogyakarta.